

PERAN PENDAMPING PROGRAM DALAM MENGATASI KEMISKINAN

THE ROLE OF ACCOMPANYING PROGRAM IN OVERCOMING POVERTY

Fajar Siddik*, Sally Marisa Sihombing

Prodi Ilmu Administrasi Publik, FISIP, Universitas Sumatera Utara, Medan

*Koresponden email: fjarsiddik@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh beberapa kasus yang ditemui pada program keluarga harapan diantaranya adanya istilah program keluarga harapan hanyalah sebuah program yang menunda kemiskinan tapi tidak memberantas kemiskinan itu sendiri. Beberapa yang menjadi penyebab terjadinya hal tersebut kurang kompetennya petugas dari pendamping PKH dan kurang pedulinya masyarakat penerima manfaat dalam mengatasi angka kemiskinan pada didirinya. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deksriptif dengan pendekatan kualitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Kemudian informan yang digunakan dalam penelitian ini adalah keluarga penerima manfaat dan masyarakat miskin yang belum menerima PKH di kelurahan Binjai. Teknik analisis data yang digunakan, berdasarkan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan dan verifikasi data. Sedangkan teknik keabsahan data menggunakan triangulasi data. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan program keluarga harapan di kelurahan binjai kecamatan medan denai fasilitator, pelaksanaan program sudah dilakukan dengan sangat baik oleh pendamping PKH yaitu memotoring mereka yang menerima bantuan harapan dan juga memotivasi para penerima keluarga manfaat. Dari segi pendidikan sendiri pendamping pkh di kelurahan binjai melakukan pertemuan minimal seminggu sekali kepada penerima manfaat yaitu memberikan pembelajaran berupa modul kepada keluarga penerima manfaat. Dari segi perwakilan masyarakat sendiri pendamping PKH membantu dan mendampingi para penerima manfaat apabila ada keluhan yang terjadi pada mereka seperti menggunakan lembaga luar untuk membantu para penerima manfaat sendiri.

Kata kunci: Program Keluarga Harapan, Pendamping PKH, Keluarga Penerima Manfaat

ABSTRACT

This research was motivated by several cases encountered in the family hope program, including the term family hope program is just a program that delays poverty but does not eradicate poverty itself. Some of the causes of this are the lack of competence of the PKH assistant officers and the lack of concern of the beneficiary community in overcoming the poverty rate among themselves. The research method used in this research is descriptive research with a qualitative approach. Data collection was carried out using interview, observation and documentation techniques. The data collection techniques used were observation, interviews and documentation. Then the informants used in this research were beneficiary families and poor communities who had not received PKH in the Binjai sub-district. The data analysis techniques used are based on data reduction, data presentation, and drawing conclusions and data verification. Meanwhile, data validity techniques use data triangulation. The results of this study indicate that the implementation of the family hope program in binjai village, medan denai sub-district, the facilitator, the implementation of the program has been carried out very well by PKH assistants, namely motivating those who receive hope assistance and also motivating the beneficiaries of the beneficiary family. In terms of education itself, the PKH facilitator in Binjai sub-district conducts meetings at least once a week with beneficiaries, namely providing learning in the form of modules to beneficiary families. In terms of community representation itself, PKH assistants help and assist beneficiaries if there are complaints that occur to them, such as using outside agencies to help the beneficiaries themselves.

Keywords: Hope Family Program, PKH Facilitator, Beneficiary Families

PENDAHULUAN

Jumlah penduduk Indonesia pada tahun 2022 meningkat sebanyak 275,5 juta orang. Dengan jumlah penduduk yang hampir mencapai 278 juta, pemerintah Indonesia harusnya memberikan perhatian khusus terhadap kesejahteraan penduduk. Dengan total penduduk sebanyak itu membuat tingkat kriminalitas, pengangguran, dan kemiskinan meningkat. Pengangguran yang tinggi berpengaruh langsung maupun tidak langsung terhadap kemis-

kinan (Alfaritdzi, 2023). Kemiskinan merupakan masalah utama bagi banyak negara di dunia, terutama di negara berkembang. Kemiskinan merupakan kondisi dimana seseorang yang tidak dapat memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, obat-obatan dan tempat tinggal. Maka salah satu ukuran kondisi sosial dan ekonomi dalam menilai keberhasilan pembangunan pemerintah di suatu daerah adalah adanya penanggulangan kemiskinan itu sendiri. Pemenuhan kebutuhan hidup

didalam masyarakat sangatlah penting dan menjadi hal utama (Putong, 2022).

Salah satu upaya Pemerintah dalam penanggulangan kemiskinan di adalah dengan melaksanakan Program Keluarga Harapan (PKH). Program ini dimulai sejak tahun 1997 sebagai upaya percepatan penanggulangan kemiskinan sekaligus pengembangan kebijakan dibidang perlindungan sosial. Tahap awal (uji coba) pelaksanaan PKH tahun 2007, telah diberikan bantuan tunai bersyarat kepada 392.000 RTSM ditujuh provinsi, yaitu Gorontalo, Sumatera Barat, Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur, Sulawesi Utara dan Nusa Tenggara Timur. Pada tahun 2010 tercatat secara nasional keseluruhan penerima manfaat PKH sebanyak 772.830 rumah tangga sangat miskin yang tersebar di 20 propinsi dari 33 provinsi.

Menurut Rahayu (2012) program keluarga harapan (PKH) adalah program pemberian uang tunai kepada RTSM berdasarkan persyaratan dan ketentuan yang telah ditetapkan dengan melaksanakan kewajibannya, PKH difokuskan untuk meningkatkan kualitas sumber daya masyarakat miskin melalui pemberdayaan kaum ibu, dan mendorong agar anaknya tetap bersekolah sesuai dengan data yang ditetapkan oleh BPS sebagai target peserta. PKH dilatar belakangi karena masih banyaknya RTSM yang tidak dapat memenuhi kebutuhan dasar pendidikan dan kesehatan disebabkan oleh akar permasalahan yang terjadi baik pada sisi RTSM maupun sisi pelayanan.

Kerangka pemikiran PKH adalah rantai kemiskinan dapat diputus dengan cara melakukan intervensi pemberian bantuan tunai untuk pemenuhan kebutuhan sehari-hari dengan persyaratan RTSM tersebut memeriksakan kesehatan dan menyekolahkan anaknya serta membuka peluang terjadinya sinergi antara program yang mengintervensi sisi supply dan demand, dengan tetap mengoptimalkan Desentralisasi, kordinasi antar sector, koordinasi antar tingkat Pemerintahan, serta antar pemangku kepentingan (*stakeholders*).

Untuk mencapai tujuan tersebut maka perangkat pendukung berupa kelembagaan dan sumber daya manusia dalam melaksanakan program ini sangat diperlukan. Pada level nasional dibentuk tim koordinasi Unit Pelaksana Program Keluarga Harapan Pusat (UPPKH Pusat) sampai pada tingkat kabupaten terdapat tim koordinasi dan unit pelaksana program keluarga harapan kabupaten. Pada tingkat kecamatan unit pelaksana program keluarga harapan adalah pendamping PKH.

Namun dalam pelaksanaannya banyak ditemukan beberapa kasus pendamping pkh melakukan penyelewangan atas kekuasaan yang dia miliki. Salah satunya kasus seorang perempuan mantan pendamping PKH yang berinisial ASP yang bertempat tinggal di malang kecamatan tumpang. Ita

melakukan tindakan penyelewangan dana bpnt dengan menahan bantuannya tersebut kepada penerima. Selain itu, dib eberapa daerah di Indonesia juga banyak terjadi penyelewangan, salah satunya adalah di Kota Medan.

Program Keluarga Harapan yang ada di Kecamatan Medan Denai dimulai tepatnya sejak tahun 2008. Peserta PKH disini terbagi dari hasil validasi data dan closing oleh pendamping. Adapun jumlah kelompok peserta berkisar 20 kelompok dimana pada setiap kelompoknya terdiri ketua, sekretaris dan bendahara kelompok. Pendamping akan melaksanakan pertemuan kelompok bersama anggota setiap bulannya dan setiap peremuan aka nada materi dan agenda agenda lain dalam pertemuan kelompok.

Pada saat pertemuan kelompok banyak hal hal yang dibahas mulai dari menyampaikan/ menginformasikan hal hal yang dianggap penting kepada anggota pkh dan pendamping juga mendengarkan keluhan-keluhan yang disampaikan oleh peserta PKH. Selain itu pendamping juga akan senantiasa berkoordinasi dengan aparat kelurahan maupun kecamatan dalam rangka terbangunnya kerjasama yang baik untuk mensukseskan program ini yang akan berlanjut di masing-masing kelurahan maupun kecamatan tempat kegiatan diselenggarakan tepatnya.

Kecamatan Medan Denai sendiri memiliki 7 kelurahan, dimana disetiap kelurahan didampingi oleh satu atau dua pendamping. Objek yang di lakukan adalah di Kelurahan Binjai yang memiliki 834 penerima keluarga manfaat yang dimana rata-rata penerimanya menerima PKH sejak tahun 2008. Dari beberapa warga yang diwawancarai disana pendamping PKH di Kelurahan Binjai mengacu pada Glen Elder peran pendamping PKH dianggap memenuhi beberapa indikator sebagai teknisi data dan pendidik, tetapi kurang dalam memenuhi peran pendamping sebagai fasilitator. Pendamping PKH sebagai fasilitator di anggap kurang dalam meredam tingginya angka penggunaan dana yang dilakukan oleh penerima karena dianggap hanya bekerja sebagai teknisi data tapi bukan motivator bagi penerima pendamping.

Kesenjangan kinerja pendamping ini memunculkan tindakan-tindakan yang tidak sesuai dengan peran penamping sendiri. Sebagian masyarakat hanya berfokus pada proses pencarian dana karena menganggap bahwa tugas dari pendamping hanya sebagai penginformasian kapan cairnya dana dari PKH sehingga garis angka kemiskinan akan terus terjadi di kecamatan medan denai karena kurangnya peran penting dari pendamping itu sendiri.

Permasalahan terkait PKH di Kecamatan Medan Denai, diantaranya adalah pendamping program jarang melakukan sosialisasi atau pertemuan

kelompok. Pertemuan kelompok hanya diinformasikan kepada ketua kelompok. Pendamping PKH memiliki peran yang sangat penting dalam proses mensukseskan program keluarga harapan, karena pendamping PKH yang berada diposisi terdekat dengan penerima bantuan pkh itu sendiri. Adapun tugas dan fungsi pendamping sosial meliputi penyusunan rencana kerja PKH di wilayah dampingannya, melakukan sosialisasi kebijakan dan bisnis proses PKH kepada aparat pemerintah tingkat kecamatan, desa/kelurahan, KPM PKH dan masyarakat umum secara berkala.

Dari adanya peran pendamping PKH, seharusnya penerima bantuan PKH bisa diarahkan untuk mempergunakan bantuan itu dengan sebaik-baiknya. Fungsi dari pendamping PKH seharusnya memiliki peran yang sangat khusus untuk mengurangi angka kemiskinan tersebut. Bukan malah pendamping PKH yang melakukan tindakan penyelewengan wewenang seperti tindakan pungli, korupsi, manipulative data, dan lain sebagainya.

METODE

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Menurut Moleong (2007) metodologi kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis maupun lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Lokasi peneliti yang di ambil penulis berada di kelurahan binjai, kecamatan medan denai. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Kemudian informan yang digunakan dalam penelitian ini adalah keluarga penerima manfaat dan masyarakat miskin yang belum menerima PKH di Kelurahan Binjai. Teknik analisis data yang digunakan, berdasarkan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan dan verifikasi data. Sedangkan teknik keabsahan data menggunakan triangulasi data.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pendamping menjadi sangat penting keberadaannya ditengah-tengah masyarakat. Pendamping memiliki kedudukan sebagai mitra pemerintah dan mitra masyarakat sehingga peran yang dimiliki menjadi salah satu cara untuk menjembatani berbagai kepentingan yang dibutuhkan pemerintah dan masyarakat itu sendiri. Peran pendamping menurut Undang-Undang nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak pada Pasal 1 Ayat (14) yang dimaksud pendamping adalah pekerja sosial yang mempunyai kompetensi profesional dalam bidangnya. Baik dalam segi negosiasi, memberi dukungan, serta melakukan pengorganisasian dan pemanfaatan sumber. Pengertian ini juga perlu diketahui oleh masyarakat yang terlibat dalam

pelaksanaan program PKH untuk bersama-sama melakukan monitoring apa-apa saja yang perlu ditingkatkan. Dalam pendampingan program PKH, terdapat beberapa kegiatan yang telah dilaksanakan sesuai dengan program yang telah ada pada program khusus yang telah disepakati oleh pusat. Kebijakan-kebijkan yang telah disepakati dalam buku panduan telah mambantu pendamping dalam menjalankan sebuah peran.

Pada hakikatnya dalam pendampingan ada beberapa indikator yang menjadi pegangan pendamping untuk melaksanakan perannya. Diantaranya adalah sebagai berikut.

Fasilitator

Fasilitator adalah individu atau intitas yang memainkan peran penting dalam memandu, memfasilitasi, dan memajukan proses komunikasi, pembelajaran, atau pengambilan keputusan dalam berbagai konteks. Fasilitator berfungsi sebagai pemimpin yang bersifat netral, tidak memihak, dan berusaha menciptakan lingkungan yang mendukung kolaborasi, pemahaman, dan pencapaian tujuan bersama. Mereka memfasilitasi diskusi, mempromosikan keterlibatan aktif, serta membantu peserta dalam mengidentifikasi masalah, merancang solusi, dan mencapai hasil yang diinginkan.

Fasilitator juga memiliki peran dalam mitigasi konflik, mengelola waktu, dan memastikan bahwa setiap peseta memiliki kesempatan yang sama untuk berkontribusi. Merekaa sering digunakan dalam pertemuan, lokakarya, pelatihan, dan proses konsultasi, di mana keahlian mereka dalam memandu proses menjadi penting. Sebagai komunikator yang efektif, fasilitator harus memiliki keterampilan mendengarkan yang baik, komunikasi verbal dan non-verbal yang jelas, serta pemahaman yang kuat tentang tujuan dan konteks kegiatan yang difasilitasi. Dengan bantuan fasilitator yang terampil, kelompok dapat mencapai pemahaman yang lebih mendalam, solusi yang lebih efektif, dan kolaborasi yang lebih produktif.

Tabel 1. Peran Fasilitator PKH di Kecamatan Denai

| | |
|---|--|
| Mengenal dan mengamati peseta bantuan PKH | Dari hasil wawancara diketahui bahwa penerima bantuan PKH khususnya kelurahan binjai memiliki karakter yang kurang peduli dengan program ini mereka menganggap bahwa program PKH hanya sekedar bantuan tunai. Pendamping PKH juga memahami bagaimana mata pencarian masyarakat penerima PKH itu sendiri, bagaimana kehidupan sosialnya |
| Menangani Masalah | Dari hasil wawancara yang dilakukan kepada pendamping PKH diketahui bahwa program PKH ini termasuk kedalam program yang paling sensitive di |

| | |
|--|--|
| | <p>kalangan masyarakat. karena di anggap program PKH ini adalah program nepotisme yang penerimanya adalah kerabat yang memiliki kedekatan di dinas sosial. Disisi lain pendamping sendiri gesit dalam merespon masalah yang dialami oleh penerima, sehingga cukup sekali pertemuan masalah yang disampaikan dapat terselesaikan. karena pendamping dalam menjawab permasalahan itu sendiri juga harus menunggu respon dari pusat dalam penyelesaian masalah tersebut. karena bagaimana juga pendamping adalah sebagai penghubung kepada pemerintahan pusat tentang masalah yang dialami oleh penerima bantuan PKH.</p> |
|--|--|

Pendidik

Pendidik adalah sosok yang memiliki peran kunci dalam proses pendidikan. Mereka memainkan peranan sentral dalam mengajar dan membimbing terkusnya kepada penerima bantuan PKH, baik itu di lingkungan sosial sosial formal maupun berbagai konteks pendidikan nonformal lainnya. Peran pendidik mencangkup beberapa dimensi. Pertama, sebagai penyampai pengetahuan, mereka bertanggung jawab untuk mengerjakan materi pelajaran, mengembangkan pembelajaran, dan membantuan penerima PKH memahami konsep-konsep dan pembelajaran yang di berikan.

Pendidik juga berperan dalam menciptakan lingkungan belajar yang aman dan mendukung, dimana penerima merasa nyaman untuk mengemukakan pertanyaan, mencoba hal baru, dan mengatasi tantangan. Selain itu, pendamping juga berperan sebagai mentor, memberikan dukungan dan bimbingan dalam perkembangan pribadi dan pengetahuan penerima, membantu mengembangkan keterampilan sosial, etika dan karakter. Pendidik juga memiliki peran dalam menilai kemajuan penerima, memberikan umpan balik, dan merancang strategi pembelajaran yang sesuai untuk memenuhi kebutuhan individu. Terakhir, sebagai model peran, pendidik memberikan contoh tentang bagaimana menjadi penerima yang bertanggung jawab, etis, dan berkontribusi dalam masyarakat.

Pendamping sebelum menyampaikan modul pembelajaran kepada penerima bantuan PKH, dari kementerian sosial sendiri sudah melakukan pelatihan kepada pendamping agar tujuan tentang penyampain kepada penerima dapat tersampaikan. Hal tersebut di dukung dengan program dari dinas sosial yaitu program yang dilaksanakan lima bulan sekali. Dalam hal ini pendamping memiliki peran

fasilitator yaitu sebagai pembelajaran kepada penerima.

Selain itu, pada saat penyampain materi kepada penerima bantuan PKH terdapat beberapa kendala seperti kurangnya prasarana yang diberikan seperti infokus, ataupun alat peraga lainnya yang membantu dalam memaksimalkan penyampaian yang di berikan kepada penerima. Disisi lain yang menjadi kendala adalah penyampaian yang dilakukan oleh pendamping tidak terlalu dipahami sehingga hal itu hanya sekedar penyampain formalitas saja, tapi ada juga bentuk *follow up* pembelajaran oleh pendamping PKH untuk menekankan pemahaman yang lebih mendalam kepada penerima PKH.

Perwakilan Masyarakat

Menjadi seorang pendamping juga merupakan penghubung antara masyarakat dan lembaga pemerintahan, dimana pendamping dapat berinteraksi dengan lembaga-lembaga eksternal utuk kepentingan masyarakat. Terkait dengan pendamping di kelurahan binjai mempunyai peran penting sebagai perwakilan masyarakat.

Peran pendamping PKH di kelurahan sebagai perwakilan masyarakat dirasa sesuai dengan yang diharapkan. Pasalnya pendamping berperan cukup baik dalam pelaksanaan PKH di Kelurahan Binjai. Dalam mempererat hubungan masyarakat dengan lembaga/organisasi pemerintahan terkadang pendamping melakukan pertemuan dengan lembaga/organisasi pemerintahan dan juga mengundang tokoh-tokoh masyarakat dalam rapat sosialisasi dengan pihak desa sehingga ada keterlibatan pihak masyarakat.

Peranan Teknis

Teknis pendamping PKH memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung efektifitas dan keberlanjutan program bantuan sosial ini. Mereka bertindak seabgai jembatan antara pemerintah dan penerima manfaat PKH, dengan tugas utama mereka adalah memberikan bimbingan dan pendampingan kepada keluarga penerima manfaat. Peranan teknis pendamping ini membantu keluarga untuk memahami dan memenuhi persyaratan program, termasuk pemenuhan komitmen dalam bidang kesehatan dan pendidikan. Mereka juga memberikan informasi dan pelatihan kepada penerima manfaat tentang keterampilan hidup, pendidikan kesehatan dan perkembangan anak.

Selain itu, teknis pendamping juga berperan dalam pemantauan dan pelaporan terkait pelaksanaan program, serta memberikan masukan kepada pihak berwenang untuk perbaikan yang diperlukan. Dengan peran yang krusial ini, teknis pendamping membantu memastikan bahwa bantuan yang diberikan oleh program dapat benar-benar memberi-

kan manfaat yang signifikan bagi keluarga penerima manfaat dan berkontribusi pada upaya pengentasan kemiskinan di Indonesia. Maka dalam peranan teknis pendamping sosial meliputi beberapa hal, yaitu:

Preventif

Kegiatan preventif adalah kegiatan dalam upaya untuk mencegah sebelum permasalahan terjadi. Kegiatan preventif yang dilaksanakan oleh pendamping sosial di Kelurahan Binjai, yaitu melakukan pengecekan data atau memvalidasi data yang di terima oleh BPS atas warga yang terdata sebagai keluarga penerima manfaat. Dalam hal ini pendamping PKH melakukan pengecekan data apa benar masyarakat tersebut penerima program PKH dengan ketentuan dan bukti yang jelas. Dalam beberapa kasus seringkali ditemukan kesalahpahaman bahwa pendamping PKH memiliki hak dalam memasukan dan mengeluarkan penerima bantuan PKH.

Pendamping memiliki peran preventif harus berjalan untuk mengurangi angka permasalahan yang terjadi di masyarakat. Karena konflik bisa terjadi kepada pendamping tentang beberapa masyarakat yang merasa dirinya pantas untuk menerima tapi kenyataannya tidak. Dalam peraturan Menteri Sosial nomor 1 tahun 2018 bagian keempat tentang validasi data calon penerima manfaat PKH pada pasal 35 berbunyi bahwa validasi data dilakukan pencocokan data awal calon penerima manfaat PKH dengan bukti dan fakta kondisi terkeni yang sesuai dengan kriteria komponen sebagai yang dimaksud.

Pernyataan itu juga di tambahkan berdasarkan UU No.13 tahun 2011 dan permensos No 3 tahun 2001 semua program bantuan dan pemberdayaan pemerintahan dalam skala penanganan fakir miskin harus berdasar data terpadu kesejahteraan sosial. Sedangkan DTKS berbasis data kependudukan. Pada dasarnya pengusulan untuk masuk dalam DTKS ataupun pengusulan menjadi keluarga penerima manfaat yang merupakan program regular kementerian sosial.

Merupakan kewenangan pemerintah daerah kabupaten/kota bersama pemerintah lingkup kecil desa/kelurahan. Artinya setiap lurah dapat mengusulkan warga yang tidak mampu dan membutuhkan diwilayahnya untuk masuk DTKS dan mengakses bantuan.

Kuratif/Rehabilitatif

Kegiatan rehabilitative atau kuratif adalah kegiatan dalam upaya memecahkan, mengatasi, memperbaiki dan memulihkan suatu kondisi, dari bermasalah menuju keberfungsian sosial. Kegiatan kuratif yang dilaksanakan oleh pendamping sosial di Kelurahan Binjai. Yaitu seperti mengatasi anak putus sekolah, yang dilakukan dengan cara mendaftarkan kembali anak tersebut pada tahun ajaran

baru, atau memasukan ke program pendidikan kejar paket A,B, atau C.

Meskipun fasilitas dan kehidupan di Kecamatan Medan Denai tergolong termasuk modernisasi. Tapi masih ditemukan anak-anak yang putus sekolah, tidak mau melanjutkan sekolahnya, tapi sebagai pendamping PKH melalui peraturan Kementerian Sosial tahun 2018 pada bagian ketujuh pendamping PKH pasal 49 nomor 4 point C memfasilitasi keluarga penerima manfaat PKH mendapatkan program bantuan komplementer di bidang kesehatan, pendidikan, subsidi energy, ekonomi, perumahan dan pemenuhan kebutuhan dasar lainnya.

Pengembangan

Kegiatan pengembangan adalah kegiatan dalam upaya menggali dan mengoptimalkan sumber pada diri KPM, sehingga mereka menjadi berdaya. Kegiatan pengembangan yang dilaksanakan oleh pendamping di Kelurahan Binjai, yaitu mendampingi KPM dalam mengelola usaha ekonomi dengan cara mengajari pembukuan sederhana, membantu merencanakan usaha dan pemanfaatan hasil usaha. Pendamping PKH bukan hanya penyampaian informasi berupa uang tunai tetapi juga membimbing penerima KPM yang ingin berusaha. Jika sudah sukses dalam usahanya biasanya mengeluarkan surat pengunduran diri sebagai penerima yang sudah tidak layak menerima bantuan PKH. Tapi angka tersebut tidak sebanding dengan beberapa penerima PKH yang ingin berusaha karena banyak rata-rata penerima PKH ini mata pencariannya adalah serabutan ataupun pekerjaan pabrik bahkan ada juga yang tidak bekerja hanya sebagai ibu rumah tangga saja. Terkadang yang menjadi faktor bahwa angka penerima selalu ada bahkan selalu bertambah adalah mindset yang ada pada penerima bantuan PKH sendiri.

Hasil analisis terhadap pelaksanaan kegiatan menunjukkan bahwa pendamping sosial sudah memiliki pengetahuan intervensi sosial yang cukup memadai, baik secara teoritis maupun praktis. Pengetahuan pendamping sosial secara teoritis maupun teknis tersebut tercermin pada kompetensi mereka dalam pelaksanaan tugas. Kompetensi pendamping sosial dapat dikatakan juga cukup memadai dibandingkan dengan tugas-tugas, beban kerja dan dinamika masyarakat.

KESIMPULAN

Peran pendamping di Kelurahan Binjai Kecamatan Medan Denai dalam hal pendampingan guna meningkatkan kesejahteraan keluarga adalah pendamping yang berperan sebagai motivator. Pendamping melakukannya dengan memberikan dukungan dan dorongan kepada keluarga penerima manfaat PKH guna memenuhi kewajiban yang harus dipenuhi selama menjadi anggota KPM.

Selain itu pendamping memberikan beberapa pilihan solusi dengan baik sampai menemukan pilihan solusi yang tepat untuk beberapa permasalahan yang dirasakan oleh KPM. Dan menjadi faktor penguat untuk memberikan keyakinan kemampuan yang dimiliki oleh anggotanya dalam melakukan suatu hal. Pendamping berperan sebagai fasilitator yang memberikan inovasi-inovasi baru seperti pengajaran rutin untuk penyampaian modul, walaupun tergolong kurang maksimal karena minimnya alat bantu seperti infokus, alat peraga dll, sehingga proses penyampaian informasi hanya berbentuk lisan kepada penerima bantuan PKH. Pendamping sebagai pendidik dapat dilihat dari bagaimana seorang pendamping berperan aktif dalam upaya peningkatan kesadaran masyarakat baik itu tentang kesehatan fisik dan kesehatan lingkungan. Peran pendamping sebagai mediator adalah dimana dengan wawasan yang dimiliki seorang pendamping, mereka mampu terbuka terhadap banyak pikiran yang mungkin menimbulkan masalah.

DAFTAR PUSTAKA

- Armstrong, M. (2014). *Armstrong's Handbook of Human Resource Management Practice*. Kogan Page Publishers
- Alfaritdizi, R. M., & Prathama, Ananta. 2023. Peran Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BPVP) dalam Mengurangi Angka Pengangguran. *Jurnal Kebijakan Publik*. Vol 14, No. 1
- Biddle, B. J. (1979). *Role Theory: Expectations, Identities, and Behaviors*. Academic Press
- George H.Mead. (1934). *Mind Self And Society*. Printed in the united of America.
- Gerungan, W.A. 2010. *Metode Penelitian Kualitatif: Filsafat dan Teori*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Hikmat, R.H. (2018). *Pedoman Pelaksanaan Program Keluarga Harapan Tahun 2019*. Jakarta: Kementrian Sosial Republik Indonesia.
- Itang. (2015). Faktor-Faktor Penyebab Kemiskinan. *Jurnal Keislaman., Kemasyarakatan, dan Kebudayaan*. Vol 16 No.1.
- Iswanti, S. I. S., & Zulkarnaini, Z. (2022). Peran Pemerintah Desa Dalam Pengembangan Objek Wisata Pulau Tilan Di Kepenghuluan Rantau Bais Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 8(1), 92-103.
- Jannah, I. N., & Zulkarnaini, Z. (2023). Efektivitas Program Bantuan Langsung Tunai-Dana Desa (BLT-DD) Di Desa Sungai Beras Hilir Kecamatan Lubuk Batu Jaya Kabupaten Indragiri Hulu. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 9(15), 248-258.
- Juberbin, Joshua. 2023. Tindak Pidana Pemalsuan Data Verifikasi Dan Validasi Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Penangan Fakir Miskin. *Jurnal Lex Privatum*. Vol.11 No.1.
- Khairiyah, N., & Zulkarnaini, Z. (2021). Efektivitas Pelaksanaan Program Satu Keluarga Satu Sarjana Oleh Baznas di Kabupaten Kampar. *Ministrate: Jurnal Birokrasi dan Pemerintahan Daerah*, 3(3), 258-266.
- Lonergan, Bernard J. 1992. *Insight: A Study of Human Understanding*. Toronto: University of Toronto Press.
- Moleong, L. J. (2017). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya
- Melati, M., & Zulkarnaini, H. (2021). Efektivitas Program Bantuan Sosial Tunai Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Kelurahan Pasir Pengaraian. *Journal Publicuho*, 4(1), 19.
- Made, A.P. (2017). Teori Peran Dan Konsep Expectation-GAP Fungsi Pengawasan Dalam Pengelolaan Keuangan Desa. *Jurnal Ekonomi dan Keuangan*. Vol 2 No.4.
- Marini, M.D. (2018). Implementasi Program Keluarga Harapan Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Miskin. *Jurnal Humaniora*. Vol 2 No.1.
- Maulida, E.P. Aminudin, Achmad. 2022. Analisis Peran Pendamping Sosial Program Keluarga Harapan Di Kecamatan Sungai Serut. *Jurnal Multidisiplin Dehasen*. Vol.1 No.3.
- Prawoto, Nano. (2009). Memahami Kemiskinan Dan Strategi Penanggulangannya. *Jurnal Ekonomi Dan Studi Pembangunan*. Vol.9 No.1.
- Putong, L. B., & Wahyudi, K, E. (2022). Implementasi Program Bantuan Sosial Tunai pada UMKM. *Jurnal Kebijakan Publik*. Vol 13, No. 4
- Rangga, Dimas. 2022. Penyalahgunaan Wewenang Dalam Tindak Pidana Korupsi Yang Dilakukan Oleh Pendamping Sosial Program Keluarga Harapan (PKH). *Jurnal indonesia hukum dan pemerintah sosial politik*. Vol.2 No.3.
- Subhan, M., Zulkarnaini, Z., Meiwanda, G., & Putri, R. A. (2022). Analisis Peran Stakeholder dalam Program Siak Hijau di Kabupaten Siak. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 8(22), 439-454.
- Sutanto, E. M. (2012). *Administrasi Publik: Perspektif Baru dan Penerapannya di Indonesia*. Pustaka Pelajar.
- Turner, R. H. (1978). The Role and the Person. *American Journal of Sociology*, 84 (1), 1-23